

**ANALISIS HILIRISASI TEMBAKAU DI PROVINSI LAMPUNG  
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH**

**(Tesis)**

**Oleh**

**ASRIAN HENDI CAYA  
NPM 2421021018**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**ANALISIS HILIRISASI TEMBAKAU DI PROVINSI LAMPUNG  
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH**

**Oleh**

**ASRIAN HENDI CAYA**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER EKONOMI**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### ANALISIS HILIRISASI TEMBAKAU DI PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Oleh

**Asrian Hendi Caya**

Penelitian ini menganalisis hilirisasi tembakau sebagai upaya peningkatan perekonomian dan pendapatan daerah di Provinsi Lampung yang fokus kajiannya pada aktor (stakeholders). Metode yang digunakan adalah *Multiple Stakeholder Analysis* (MSA) melalui pendekatan MACTOR, yang secara spesifik melibatkan 7 aktor pemangku kepentingan utama dan 5 tujuan strategis kebijakan. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa ekosistem hilirisasi saat ini dikendalikan oleh aktor industri (skor daya saing 2,1), yang secara fundamental ditopang kuat oleh peran petani tembakau (1,9). Dugaan awal penelitian terkonfirmasi hilirisasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Hal ini dibuktikan oleh konsensus mayoritas aktor pada tujuan Pengembangan Ekonomi Daerah dan Pengendalian Rokok Ilegal. Namun, tata kelola ini masih menyimpan paradoks struktural. Meskipun terbentuk aliansi operasional yang solid (INDUSTRI-PETANI dan BAPPEDA-PERINDAG), terjadi divergensi kepentingan yang ekstrem akibat konflik harga bahan baku dan friksi orientasi birokrasi. Secara anomali, NGO dan institusi kesehatan justru memiliki kedekatan posisi dengan pemerintah pada isu makro. Kesimpulannya, keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah memediasi konflik tata niaga melalui kemitraan (*contract farming*), mereintegrasi peran Dinas Perkebunan, serta mengalokasikan DBH CHT secara inklusif untuk teknologi pascapanen dan mitigasi kesehatan publik.

**Kata Kunci: Hilirisasi Tembakau, Pendapatan Daerah, MACTOR, Kebijakan Ekonomi, Lampung**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF TOBACCO DOWNSTREAMING IN LAMPUNG PROVINCE AS AN EFFORT TO INCREASE THE ECONOMY AND REGIONAL INCOME**

**By**

**Asrian Hendi Caya**

This research analyzes the downstreaming of tobacco as an effort to improve the economy and regional income in Lampung Province, with a focus of study on the actors (stakeholders). The method used is Multiple Stakeholder Analysis (MSA) through the MACTOR approach, specifically involving 7 main stakeholder actors and 5 strategic policy objectives. Mapping results indicate that the downstreaming ecosystem is currently controlled by the Industry actor (competitiveness score of 2.1), which is fundamentally supported by the role of Tobacco Farmers (1.9). The initial research hypothesis is confirmed: downstreaming has significant potential to increase regional income through the optimization of the Tobacco Product Excise Revenue Sharing Fund (DBH CHT). This is evidenced by the majority consensus of the actors on the objectives of Regional Economic Development and Illegal Cigarette Control. However, this governance still holds a structural paradox. Despite the formation of solid operational alliances (INDUSTRI-PETANI and BAPPEDA-PERINDAG), extreme divergence of interests occurs due to raw material price conflicts and bureaucratic orientation friction. Anomalously, NGO and Health institutions actually share a close position with the government on macro issues. In conclusion, the success of downstreaming heavily relies on the local government's capacity to mediate trade conflicts through partnerships (contract farming), reintegrate the role of the Plantation Office, and inclusively allocate DBH CHT for post harvest technology and public health mitigation.

**Keywords: Tobacco Downstreaming, Regional Income, MACTOR, Economic Policy, Lampung**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa TESIS ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Mei 2026



**Asrian Hendi Caya**

Judul Tesis

**ANALISIS HILIRISASI TEMBAKAU DI  
PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI UPAYA  
PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN  
PENDAPATAN DAERAH**

Nama Mahasiswa

**Asrian Hendi Caya**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2421021018

Jurusan

: Magister Ilmu Ekonomi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**




**Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.**  
NIP 197707292005011001



**Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E.**  
NIP 197404102008122001

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi**



**Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E.**  
NIP 197404102008122001

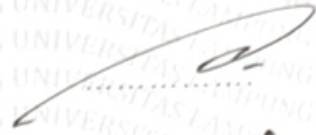
**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

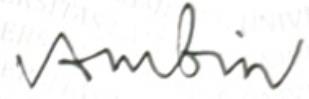
Ketua : **Dr. Dedy Yuliawan, S.E, M.Si.**



Sekretaris : **Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E.**



Penguji 1 : **Prof. Dr. Ambya, S.E, M.Si.**



Penguji II : **Dr. Neli Aida, S.E., M.Si**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**

NIP 198606211990031003

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**

NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 21 Mei 2026

## RIWAYAT HIDUP



Nama : Asrian Hendi Caya  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 10-01-1964  
Alamat : Jl. Rawa Bengkel 31 LK1,  
Enggal, Bandarlampung  
No. Hp : 0811795229  
Email : asrian2000@gmail.com

## RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. SD Muhammadiyah Talangpadang, 1976
2. SMPN 2 Bandar Lampung, 1979
3. SMAN 2 Bandar Lampung, 1982
4. Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, 1987

**MOTTO**

*“ Ilmu Amaliah, Amal Ilmiah ”*

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT serta shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya atas segala nikmat dan kasih sayang-Nya, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Kupersembahkan karya tulis ilmiah ini untuk orang-orang yang kusayangi: Elvira Umihanni, Tazakka Viddien Caya, Tazkia Vidini Caya, Atthariqia Vidina Caya.

Terima kasih pula untuk Almamater tercinta Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

## SANWACANA

*Bismillahirrohmaanirrohiim,*

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“ANALISIS HILIRISASI TEMBAKAU DI PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN PENDAPATAN DAERAH”**. Tesis ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Magister Ekonomi pada program studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis memperoleh bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis.
4. Bapak Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Pertama atas kesediaannya dalam memberikan bimbingan, pengetahuan, kritik dan saran dalam proses akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji Pertama yang telah memberikan saran, pengetahuan, pengarahan dan motivasi dalam penulisan tesis ini.

6. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan saran, pengetahuan, pengarahan dan motivasi dalam penulisan tesis ini.
7. Bapak Prof. Toto Gunarto, S.E., M.Si. yang telah membimbing dan memberikan masukan atas penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu dosen yang mengajar Magister Ilmu Ekonomi.
9. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua limpahan kasih sayang, dukungan, doa, bantuan, dan pengorbanan yang telah diberikan hingga tercapainya gelar Magister Ekonomi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberi masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini, terimakasih atas semua doa, bantuan, dan dukungannya.
11. Terimakasih untuk Almamater Tercinta.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna. Namun demikian, semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 21 Mei 2026  
Penulis,

Asrian Hendi Caya

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	6
1.3    Tujuan Penelitian .....	7
1.4    Manfaat Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1    Landasan Teori.....	9
2.1.1    Pertumbuhan Ekonomi .....	9
2.1.2    Sektor Basis .....	11
2.1.3    Peran Pemerintah dalam Perekonomian .....	12
2.1.4    Cukai .....	13
2.1.5    Hilirisasi.....	15
2.2    Kerangka Pemikiran .....	18
2.3    Hipotesis .....	19
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>20</b>
3.1    Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	20
3.2 <i>Focus Grup Discussion</i> .....	20
3.3    Teknik Analisis Data .....	22
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>27</b>
4.1    Hasil Penelitian .....	27
4.1.1    Jumlah Perokok dan Nilai Pengeluaran untuk Rokok .....	27
4.1.2    Hasil <i>Focus Group Discussion</i> dan Penentuan Nilai.....	29
4.1.3    Hasil Konfigurasi Kekuatan, Pengaruh, Dan Ketergantungan Antar Pemangku Kepentingan .....	31
4.1.4    Hasil Tingkat Konvergensi Dan Divergensi Kepentingan Antar Aktor	

.....	35
4.1.5 Hasil Implikasi Relasi Antar Aktor .....	42
4.2 Pembahasan .....	45
4.2.1 Diduga terdapat konfigurasi kekuatan, pengaruh, dan ketergantungan antar pemangku kepentingan dalam ekosistem hilirisasi tembakau di Provinsi Lampung .....	46
4.2.2 Diduga bahwa tingkat konvergensi dan divergensi kepentingan antar aktor terhadap tujuan strategis hilirisasi tembakau.....	48
4.2.3 Diduga terdapat implikasi relasi antar aktor tersebut terhadap perumusan strategi peningkatan perekonomian dan pendapatan daerah.....	48
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>50</b>
5.1 Simpulan .....	50
5.2 Saran .....	52

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Neraca Perdagangan Antarwilayah Provinsi Lampung (Rp Triliun).....	3
Tabel 1. 2 Produksi Daun Tembakau Kering Lampung (Ton) .....	5
Tabel 1. 3 Peran Variabel dan Implikasinya .....	24
Tabel 4. 1 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Untuk Rokok (Rp).....	27
Tabel 4. 2 Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Untuk Rokok (Rp) .....	27
Tabel 4. 3 Tingkat Perokok (%) dan Jumlah Perokok (Juta) di Lampung.....	28
Tabel 4. 4 Pengeluaran Untuk Rokok Di Lampung (Rp).....	29

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pengeluaran Perkapita Rokok di Provinsi Lampung.....	2
Gambar 1.2 Perkembangan Tenaga Kerja Industri Pengolahan Tembakau di Indonesia Tahun 2017-2022 .....	4
Gambar 1.3 Tren Jumlah Perusahaan Pengolahan Tembakau di Indonesia .....	4
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	19
Gambar 3.1 Pengaruh langsung dan tidak langsung antar aktor .....	24
Gambar 4.1 <i>Matrix of Direct Influences (MDI)</i> .....	29
Gambar 4.2 <i>Matrix of Actors Objectives (2MAO)</i> .....	30
Gambar 4.3 Map of influences and dependences between actors.....	31
Gambar 4.4 <i>MDII Competitiveness</i> .....	33
Gambar 4.5 <i>Histogram of actor's implication towards its objectives 2MAO</i> .....	34
Gambar 4.6 <i>Graph of Order 1 Convergences Between Actors</i> .....	36
Gambar 4.7 <i>Graph of Order 2 Convergences Between Actors</i> .....	40
Gambar 4.8 <i>Graph of net distances between objectives</i> .....	42
Gambar 4.9 <i>Graph of Order 2 Convergences Between Actors</i> .....	44

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rokok merupakan salah satu produk konsumsi yang memiliki pengaruh besar terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Secara historis, rokok berkembang dari komoditas budaya menjadi industri modern berskala global yang menyasar berbagai kelompok umur melalui strategi pemasaran yang agresif dan inovatif. Di Indonesia, rokok bahkan memiliki posisi khusus dalam struktur ekonomi, karena industri tembakau menjadi sumber lapangan pekerjaan, pendapatan daerah, serta penerimaan negara melalui cukai dan pajak. Menurut Kementerian Keuangan, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau menjadi salah satu kontributor terbesar dalam struktur penerimaan cukai nasional setiap tahunnya.

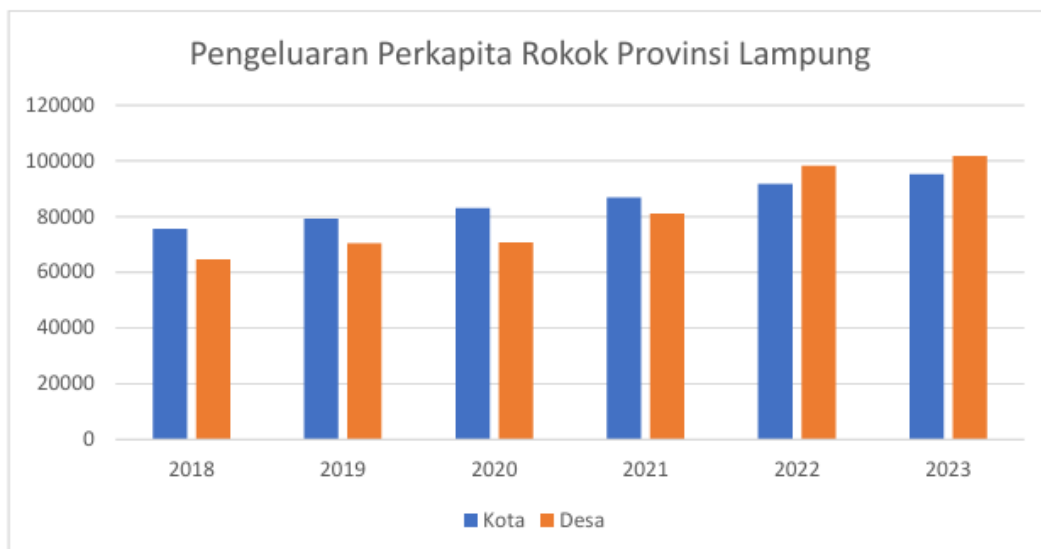
Merokok adalah kegiatan yang dianggap tidak baik karena bisa mengganggu kesehatan. Kegiatan ini sendiri dianggap tidak punya manfaat. Karena itu dianggap pemborosan. Banyak upaya yang sudah dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mengendalikan dan menghilangkan kebiasaan merokok. Pemerintah mengenakan cukai kepada rokok agar harga rokok tinggi sehingga menekan pembelian rokok yang diharapkan akan mengurangi kebiasaan merokok.

Beberapa tempat ditetapkan pemerintah sebagai kawasan anti rokok dengan maksud mengendalikan. Masyarakat pun dengan berbagai komunitas mengkampanyekan anti rokok. Orang tua juga melarang anak-anaknya merokok. Hanya saja kegiatan merokok sudah merupakan kebiasaan yang membudaya di masyarakat. Sampai saat ini belum ada upaya yang sampai melarang rokok secara total. Upaya yang dilakukan baik melalui regulasi maupun himbauan hanya sebatas pengendalian.

Lampung merupakan provinsi dengan perokok tertinggi di Indonesia. Selama periode 2019-2024 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang merokok tembakau selama sebulan terakhir rata-rata sebesar 33,94%. Sedangkan penduduk diatas 5

tahun yang merokok setiap hari selama sebulan terakhir mencapai 26,49%. Hal ini menunjukkan peningkatan, karena Tahun 2022 baru mencapai 25,73%.

Adapun banyaknya rokok yang dihisap setiap minggu pada Tahun 2023 sebanyak 94 batang. Jumlah ini juga menunjukkan peningkatan, karena Tahun 2022 sebanyak 87 batang per minggu. Tingginya konsumsi rokok tercermin pada pengeluaran per kapita per bulan untuk rokok. Selama periode 2018-2023 pengeluaran per kapita untuk rokok tumbuh rata-rata 8,08%. Tahun 2023 pengeluaran per kapita per bulan untuk rokok sebesar Rp99.473. Ternyata pengeluaran untuk rokok lebih besar dari untuk padi-padian, yang sebesar Rp94.894 dan merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah makanan dan minuman jadi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin tidak rasional dalam membelanjakan uangnya untuk rokok. Semata untuk memenuhi kebiasaan merokoknya.



**Gambar 1. 1 Pengeluaran Perkapita Rokok di Provinsi Lampung**

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2024)

Gambar 1.1 menunjukkan adanya kenaikan pengeluaran perkapita konsumsi rokok di Provinsi Lampung. Daerah perkotaan mengalami kenaikan yang pada tahun 2018 sebesar Rp75.500 menjadi Rp95.142 pada tahun 2023. Sedangkan daerah perdesaan pada tahun 2018 sebesar Rp67.803 meningkat menjadi 99.473 pada

tahun 2023. Dan sejak tahun 2023 masyarakat perdesaan memiliki pengeluaran untuk konsumsi rokok lebih besar dibandingkan dengan masyarakat di perkotaan.

**Tabel 1. 1 Neraca Perdagangan Antarwilayah Provinsi Lampung (Rp Triliun)**

<b>TRANSAKSI</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Pembelian</b>	6.62	40.73	40.32
<b>Penjualan</b>	3.77	19.36	18.45
<b>Neraca (Defisit)</b>	2.85	21.37	21.87

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2023)

Besarnya pengeluaran untuk rokok telah ikut menyumbang defisit perdagangan antarwilayah Provinsi Lampung. Tahun 2020 tembakau dan rokok masuk kelompok komoditas terbesar kelima untuk pembelian. Tahun 2021, masuk kelompok komoditas pembelian terbesar pertama. Dan tahun 2022 masuk kelompok komoditas pembelian terbesar kedua.

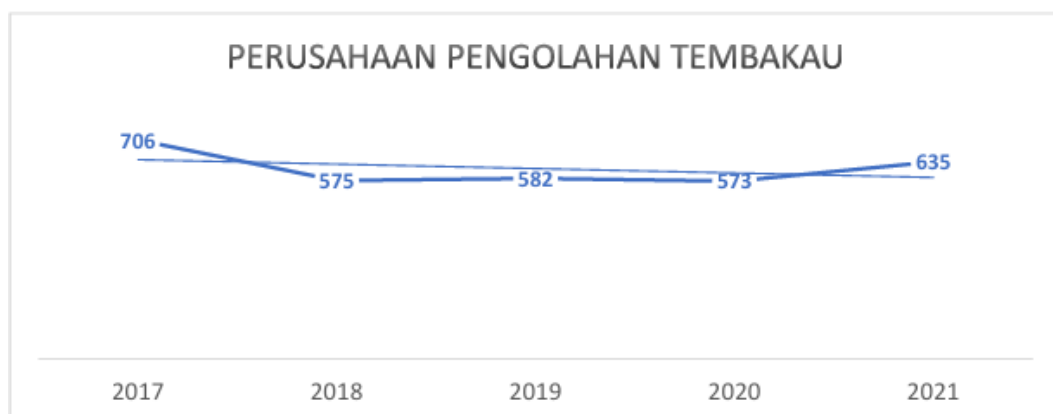
Sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya di industri rokok baik di hulu maupun di hilir. Industri rokok tidak terlepas dari industri pengolahan tembakau. Menurut data BPS, jumlah tenaga kerja industri pengolahan tembakau yang terdiri dari industri besar dan kecil menyumbang 4% dari total tenaga kerja industri yang ada di Indonesia, yaitu sebanyak 246.587 orang. Namun tren tenaga kerja cenderung menurun sejak tahun 2017 hingga 2021, hal tersebut wajar dikarenakan banyak perusahaan pengolahan tembakau yang beralih menggunakan mesin seperti terlihat dalam gambar 1.2.



**Gambar 1. 2 Perkembangan Tenaga Kerja Industri Pengolahan Tembakau di Indonesia Tahun 2017-2022**

Sumber : Publikasi Indikator Industri Manufaktur Indonesia, Badan Pusat Statistik (2022)

Penurunan Tenaga Kerja Industri Pengolahan Tembakau tersebut selain dikarenakan adanya faktor teknologi, juga terjadi penurunan jumlah perusahaan pengolahan hasil tembakau. Tahun 2017 jumlah perusahaan sebanyak 706 dan menurun sehingga pada tahun 2021 ada 635 perusahaan pengolahan tembakau.



**Gambar 1. 3 Tren Jumlah Perusahaan Pengolahan Tembakau di Indonesia**

Sumber : Publikasi Indikator Industri Manufaktur Indonesia, Badan Pusat Statistik (2022)

Sementara itu, Lampung merupakan penghasil tembakau. Berdasarkan Tabel 1.2, produksi daun tembakau kering di Provinsi Lampung selama periode 2019–2023 menunjukkan berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Produksi tembakau Lampung meningkat dari 751 ton pada tahun 2019 menjadi 910 ton pada tahun

2020, namun setelah itu mengalami penurunan cukup tajam sehingga menjadi 393 ton pada tahun 2022. Kemudian meningkat kembali menjadi 411 ton pada tahun 2023. Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah dengan produksi terbesar, meskipun produksinya juga mengalami penurunan signifikan dari 519 ton pada tahun 2020 menjadi 132 ton pada tahun 2023. Selain itu, beberapa daerah seperti Pesawaran dan Pringsewu menunjukkan produksi yang relatif lebih stabil.

**Tabel 1. 2 Produksi Daun Tembakau Kering Lampung (Ton)**

<b>KABUPATEN</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Lampung Timur</b>	300	519	300	150	132
<b>Tulang Bawang</b>	15	2	2	3	3
<b>Pesawaran</b>	84	81	81	81	82
<b>Lampung Selatan</b>	25	16	12	6	6
<b>Bandar Lampung</b>	10	7	7	2	1
<b>Pringsewu</b>	66	67	73	60	89
<b>Tanggamus</b>	124	96	58	26	28
<b>Pesisir Barat</b>	8	11	7	4	1
<b>Metro</b>	11	1	1	0	3
<b>Lambar</b>	4	7	7	7	8
<b>Lampung Tengah</b>	37	39	19	19	16
<b>Lampung Utara</b>	6	7	7	7	9
<b>Way Kanan</b>	22	23	24	24	22
<b>Tulang Bawang Barat</b>	9	9	3	0	1
<b>Mesuji</b>	30	25	4	4	10
<b>Lampung</b>	751	910	605	393	411

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2024)

Sebagai penghasil tembakau di Indonesia, Provinsi Lampung mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). DBH CHT yang didapat Pemerintah Provinsi Lampung mengalami fluktuasi namun cenderung menurun setiap tahunnya. DBH CHT Provinsi Lampung Tahun 2017 sebesar Rp12.295.208.000, turun menjadi Rp4.442.907.000 pada Tahun 2021, kemudian

naik kembali menjadi Rp6.213.751.000 pada Tahun 2023. Besaran DBH CHT selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau dan pembelian cukai rokok.

DBH CHT digunakan untuk mendanai program: a. peningkatan kualitas bahan baku; b. pembinaan industri; c. pembinaan lingkungan sosial; d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/ atau f. kegiatan lainnya. Program pembinaan lingkungan sosial adalah untuk mendukung: 1. bidang kesejahteraan masyarakat; dan 2. bidang kesehatan.

Sebagaimana diketahui merokok menjadi salah satu faktor risiko penyebab berbagai penyakit dan kematian dini. Prevalensi pengguna rokok di Indonesia terus mengalami peningkatan sehingga penyakit yang terkait dengan penggunaan tembakau dan perilaku merokok juga meningkat. Karena itu, satu sisi permintaan rokok yang besar merupakan peluang ekonomi, tapi pada sisi lain menimbulkan tantangan meningkatkan penyakit yang terkait dengan rokok.

Atas kondisi tersebut penelitian ini mengambil judul ‘Analisis Hilirisasi Tembakau di Provinsi Lampung sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian dan Pendapatan Daerah’.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian, maka rumusan masalah yang akan menjadi objek penelitian adalah:

1. Bagaimana konfigurasi kekuatan, pengaruh, dan ketergantungan antarpemangku kepentingan dalam ekosistem hilirisasi tembakau di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana tingkat konvergensi dan divergensi kepentingan antaraktor terhadap tujuan strategis hilirisasi tembakau?
3. Bagaimana implikasi relasi antaraktor tersebut terhadap perumusan strategi peningkatan perekonomian dan pendapatan daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui konfigurasi kekuatan, pengaruh, dan ketergantungan antar pemangku kepentingan dalam ekosistem hilirisasi tembakau di Provinsi Lampung
2. Mengetahui tingkat konvergensi dan divergensi kepentingan antar aktor terhadap tujuan strategis hilirisasi tembakau
3. Mengetahui implikasi relasi antar aktor tersebut terhadap perumusan strategi peningkatan perekonomian dan pendapatan daerah

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan masalah di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Praktis**

Landasan berbasis bukti (*evidence-based policy*) bagi perencana pembangunan (BAPPEDA), dinas teknis terkait, pelaku industri, dan petani dalam merumuskan peta jalan hilirisasi tembakau yang inklusif, sekaligus merancang strategi optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk mengendalikan pendapatan daerah.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian empiris di bidang perencanaan strategis dan kebijakan publik, khususnya mengenai dinamika solusi konflik antarpemangku kepentingan dalam ekosistem hilirisasi tembakau.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Perhatian pada permasalahan rokok cenderung terpusat pada pengendalian kebiasaan merokok. Merokok dianggap perilaku yang kurang baik karena dampak merokok pada kesehatan cukup kompleks. Pertama karena ada dampak langsung pada penyakit tertentu seperti batuk, TBC, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan biaya penanggulangan penyakit akibat merokok cukup tinggi. Kedua, pengeluaran untuk rokok mengurangi daya beli untuk kebutuhan pokok seperti pangan. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok yang berdampak pada pemenuhan gizi yang kurang sehingga mudah terkena penyakit.

Pengendalian rokok ini dilakukan melalui regulasi baik yang melalui tarif berupa cukai rokok maupun kawasan bebas rokok. Cukai rokok adalah bea yang dikenakan atas rokok dengan maksud harga rokok akan naik karena menambah harga pokok produksi rokok sehingga harganya akan naik. Naiknya harga rokok diharapkan akan menekan konsumsi rokok. Kawasan bebas rokok adalah peraturan yang melarang merokok di tempat-tempat tertentu, terutama ruang publik, seperti lingkungan sekolah, kesehatan, dan kantor layanan publik pemerintah.

Kenyataannya, pengendalian rokok baik melalui cukai rokok maupun kawasan bebas rokok tidak berpengaruh nyata terhadap pengendalian rokok. Data menunjukkan bahwa perokok tetap tinggi. Hasil penelitian Marbun (2025) menyimpulkan bahwa kebijakan cukai rokok di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan negara, meskipun dampaknya terhadap penurunan konsumsi rokok masih terbatas. Hal ini karena elastisitas rokok cenderung inelastis sehingga dampak harga terhadap permintaan rokok tidak sensitif. Akibatnya kenaikan harga rokok tidak mengurangi permintaan rokok secara signifikan.

Afif dan Sasana (2019) dalam studinya menyebutkan bahwa harga rokok tidak mempengaruhi tingkat konsumsi rokok per kapita, untuk itu pemerintah perlu melakukan kebijakan selain faktor harga rokok. Justru peningkatan kemiskinan dan

produksi rokok akan meningkatkan konsumsi rokok per kapita, sehingga pemerintah perlu melakukan kebijakan pengendalian di sektor pengentasan kemiskinan dan sektor pengendalian produksi rokok.

Disisi lain keberadaan industri rokok yang memproduksi rokok ikut berkontribusi dalam mengembangkan perekonomian daerah. Hasil penelitian Maulidina, Kardoyo, dan Pujiati (2024) menyimpulkan bahwa industri rokok di Kota Kudus memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat dan perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan daerah.

Artinya, manfaat ekonomi industri rokok berhadapan dengan usaha menurunkan konsumsi rokok. Karena konsumsi rokok mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan. Tantangannya adalah bagaimana mengharmoniskan antara kepentingan menumbuhkan industri tembakau dengan upaya menurunkan konsumsi rokok. Ternyata hilirisasi tembakau tidak hanya berupa rokok, tapi dapat dimanfaatkan juga sebagai bahan baku parfum, farmasi, pestisida nabati dll.

Wardhana dkk (2024) menyebutkan bahwa Tanaman tembakau memiliki kandungan senyawa volatil dan minyak atsiri yang memiliki aroma khas, sehingga kandungan tersebut dapat diekstrak dan dimanfaatkan sebagai campuran pada pembuatan parfum (Nurnasari & Wijayanti, 2019). Untuk itu, dimasa depan, perlu dilakukan hilirisasi dan diversifikasi produk berbasis bahan baku tembakau. Hilirisasi tembakau menjadi produk nonrokok menjadi pilihan strategis sejalan dengan semangat pembangunan yang berkelanjutan.

## **2.1 Landasan Teori**

### **2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

#### **2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Klasik**

Teori pertumbuhan ekonomi pertama kali dipopulerkan oleh ekonom klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus. Dalam pandangan Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pembagian kerja (division of labor),

akumulasi modal, serta mekanisme pasar bebas. Ricardo kemudian menambahkan konsep diminishing returns, khususnya pada sektor pertanian, yang menurutnya dapat menjadi penghambat pertumbuhan jika tidak ada inovasi teknologi. Malthus bahkan berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produksi pangan dapat menyebabkan stagnasi ekonomi. Meskipun banyak dikritik, teori klasik memberikan fondasi awal pemahaman mengenai hubungan antara faktor produksi, mekanisme pasar, serta dinamika pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

$$\Delta Y = f(K, L, N)$$

$\Delta Y$  = Pertumbuhan Output

K = Capital

L = Tenaga Kerja

### 2.1.1.2 Teori Neo-Klasik: Model Solow-Swan

Pada tahun 1950-an, Robert Solow dan Trevor Swan mengembangkan model pertumbuhan neoklasik yang menekankan pentingnya modal, tenaga kerja, dan teknologi sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Model Solow menyatakan bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi terutama ditentukan oleh kemajuan teknologi, bukan hanya penambahan faktor produksi fisik. Konsep utama dalam model ini adalah steady-state, yaitu kondisi ketika pertumbuhan ekonomi mencapai kestabilan karena tingkat akumulasi modal seimbang dengan depresiasi modal. Model Solow juga menegaskan bahwa negara dengan tingkat modal awal rendah cenderung tumbuh lebih cepat dibanding negara maju (konvergensi), selama memiliki akses teknologi dan kebijakan serupa.

### 2.1.1.3 Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar dikembangkan oleh Roy F. Harrod dan Evsey D. Domar, dengan cara yang berbeda tapi dengan kesimpulan yang sama, sehingga keduanya disatukan dalam teori Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar didasari pada asumsi:

1. Perekonomian bersifat tertutup,
2. Hasrat menabung ( $MPS = s$ ) adalah konstan,

3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (constant return to scale)
4. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja ( $n$ ) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Menurut Harrod-Domar bahwa pertumbuhan jangka panjang terpenuhi bila memenuhi syarat keseimbangan :  $g = K = n$ , dimana

G adalah growth, yaitu pertumbuhan output

K adalah kapital, yaitu pertumbuhan kapital

N adalah tenaga kerja, yaitu pertumbuhan angkatan kerja

### 2.1.2 Sektor Basis

Menurut teori ekonomi basis, yang dikembangkan oleh Herry W. Richardson pada tahun 1973, bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah dipengaruhi oleh sektor basis. Sektor basis adalah sektor yang bukan hanya mampu melayani permintaan lokal, tapi juga mampu memenuhi kebutuhan luar wilayah. Sektor basis dengan demikian sudah mampu melakukan ekspor, yang mendatangkan penerimaan dari daerah lain. Karena itu, sektor basis akan menyumbang produk domestic regional bruto (PDRB) yang besar dan terus tumbuh. Sementara sektor nonbasis adalah sektor yang belum mampu memenuhi sendiri kebutuhan lokal sehingga harus diimpor dari luar wilayah. Dengan demikian, akan merupakan kebocoran sumberdaya karena harus membeli dari luar wilayah dalam memenuhi kebutuhan lokalnya.

Untuk mengetahui apakah suatu sektor masuk kategori basis dan nonbasis menggunakan location quotient (LQ). Yaitu membandingkan antara kontribusi sektor wilayah dengan sektor yang sama ditingkat nasional.

Rumusannya adalah:

$$LQ = (\text{PDRB sektor } i / \text{PDRB total}) / (\text{PDB sektor } i / \text{PDB total}).$$

Jika hasil  $LQ > 1$  maka disebut sektor basis dan

jika  $LQ < 1$  maka masuk kategori sektor nonbasis.

Sektor basis adalah sektor yang sudah berkembang, karena itu, perannya besar dalam perkembangan daerah. Dalam membangun daerah, tentu saja untuk memajukan daerah maka sektor basis akan dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Sedangkan sektor nonbasis berdasarkan perkembangannya ada yang potensial menjadi sektor basis dimasa depan. Untuk itu, dalam pembangunan daerah ada upaya menambah sektor basis

### **2.1.3 Peran Pemerintah dalam Perekonomian**

Ekonomi yang semula dilakukan melalui mekanisme pasar, dimana kegiatan ekonomi ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Keseimbangan pasar tercapai pada saat harga penawaran sama dengan harga permintaan. Hal ini didasarkan atas tujuan yang ingin dicapai produsen/penjual yaitu keuntungan maksimal. Dan tujuan konsumen/pembeli adalah kepuasan maksimal. Kenyataannya, ada barang yang tidak menguntungkan bagi produsen tapi dibutuhkan oleh konsumen (publik). Ternyata tidak semua biaya terakomodir dalam perhitungan penentuan harga jual, seperti biaya kerusakan lingkungan. Hal ini sering disebut eksternalitas, yaitu dampak negatif kegiatan ekonomi, seperti polusi. Dalam konsep persaingan, yang menang adalah yang efisien. Sedangkan efisiensi berkaitan dengan skala usaha sehingga usaha skala besar cenderung akan menguasai pasar. Artinya akan terjadi ketimpangan ekonomi atau ketidakadilan ekonomi, sedikit pelaku ekonomi menguasai sebagian besar perekonomian.

Hal ini menimbulkan krisis ekonomi dunia (*malaise*) sehingga memunculkan perlunya peran pemerintah dalam perekonomian. Pendekatan yang semula bersifat mikro ekonomi diperluas dengan pendekatan makro ekonomi. Adapun tujuan peran pemerintah adalah:

1. Menyediakan barang publik, seperti infrastruktur, yang secara ekonomi tidak menguntungkan sehingga tidak diproduksi oleh pasar (pelaku ekonomi).
2. Mengatasi eksternalitas, yaitu dampak negatif kegiatan ekonomi seperti kerusakan lingkungan dan polusi yang tidak diakomodasi oleh pasar dalam perhitungan biaya sehingga harga yang terbentuk belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh biaya yang seharusnya dikeluarkan.
3. Memenuhi kecukupan barang dan jasa yang dibutuhkan, karena produsen akan memproduksi sejumlah barang dan jasa yang menghasilkan keuntungan maksimum, yang bisa jadi kebutuhannya jauh lebih besar sehingga dapat menimbulkan gejolak sosial. Misalnya, pengangguran.

4. Mengatasi ketimpangan ekonomi baik antarwilayah maupun antarpenduduk, karena persaingan pasar menyebabkan ada wilayah atau penduduk yang tersisih karena beberapa faktor baik berupa faktor alam (ketersediaan sumberdaya alam), sumberdaya buatan (infrastruktur) maupun faktor manusia (kualitas sumberdaya manusia).

Adapun bentuk keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dapat berupa:

- a. Peraturan (regulasi) yang dibutuhkan untuk pengaturan kegiatan ekonomi sehingga tertib dan teratur serta melindungi dan memfasilitasi.
- b. Pengaturan harga terutama untuk kebutuhan pokok sehingga terjadi stabilisasi harga yang berbentuk harga subsidi sehingga dibawah harga pasar, harga eceran terendah dan tertinggi.

#### **2.1.4 Cukai**

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU Cukai. Berdasarkan Pasal 2 UU 39/2007, barang kena cukai yaitu barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik:

1. konsumsinya perlu dikendalikan;
2. peredarannya perlu diawasi;
3. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Adapun barang yang kena cukai adalah (Pasal 14 angka 1 UU 7/2021) :

1. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan

3. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Berdasarkan ketentuan di atas, hasil tembakau seperti rokok merupakan salah satu barang kena cukai. Cukai Hasil Tembakau (CHT) merupakan cukai yang dikenakan pada produk hasil tembakau, yaitu Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Tembakau Iris, Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Sigaret terdiri dari Sigaret Kretek mesin/SKM, Sigaret Putih Mesin, Sigaret Kretek Tangan/SKT, Sigaret Kretek Tangan Filter, Sigaret Putih Tangan, Sigaret Putih Tangan Filter, Sigaret Kelembak Menyan.

Penerimaan CHT kemudian dibagikan kepada Daerah. Dalam UU APBN Tahun Anggaran 2009 disebutkan bahwa kebijakan transfer ke daerah bertujuan:

1. terus melaksanakan desentralisasi fiskal untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah secara konsisten;
2. mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah;
3. mengurangi kesenjangan pelayanan publik didaerah, dan upaya peningkatan perbaikan pelayanan publik didaerah.

Pada Tahun 2008-2009 CHT didistribusikan kepada daerah penghasil cukai atau daerah yang melakukan pengolahan tembakau menjadi rokok. Sejak 2010 alokasi distribusi diperluas kepada daerah penghasil tembakau. Adapun pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau (DBH CHT) yaitu dana CHT dilaksanakan untuk mendanai:

1. peningkatan kualitas bahan baku,
2. pembinaan industri,
3. pembinaan lingkungan sosial,
4. sosialisasi ketentuan dibidang cukai, dan/atau
5. pemberantasan barang kena cukai (BKC) ilegal.

### 2.1.5 Hilirisasi

Hilirisasi telah menjadi salah satu pendekatan strategis dalam pembangunan ekonomi negara yang kaya sumber daya alam, termasuk Indonesia. Pada dasarnya, hilirisasi merujuk pada upaya memperpanjang rantai nilai (value chain) melalui pengolahan lebih lanjut bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi bernilai tinggi. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat struktur industri dan meningkatkan daya saing nasional di pasar global. Dalam teori ekonomi pembangunan, hilirisasi berakar pada berbagai konsep klasik maupun modern yang menekankan industrialisasi sebagai motor pertumbuhan jangka panjang.

Secara teoritis, konsep hilirisasi terkait erat dengan teori nilai tambah yang menyatakan bahwa setiap proses pengolahan memberikan peningkatan nilai ekonomi pada suatu komoditas (Krugman & Obstfeld, *International Economics*, 2017). Dengan demikian, negara yang hanya mengekspor bahan mentah akan berada pada posisi tawar yang lemah dibandingkan negara yang mampu memproduksi barang berteknologi tinggi. Selain itu, teori keunggulan kompetitif dari Porter (1990) menjelaskan bahwa pembangunan industri pengolahan memungkinkan negara bergerak dari sekadar mengandalkan faktor alam (natural endowment) menuju penguasaan teknologi dan inovasi yang menjadi sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan.

Teori hilirisasi juga memiliki keterkaitan dengan teori keterkaitan industri (linkage theory) dari Albert O. Hirschman dalam karya klasik *The Strategy of Economic Development* (1958). Hirschman menekankan bahwa industrialisasi menciptakan backward linkages (permintaan terhadap input domestik) dan forward linkages (tersedianya bahan baku bagi industri lanjutan). Dalam konteks hilirisasi, pembangunan smelter atau pabrik pengolahan tidak hanya menciptakan nilai tambah pada produk, tetapi juga memicu tumbuhnya industri pendukung seperti logistik, energi, dan teknologi manufaktur. Karena itu, hilirisasi berpotensi menghasilkan efek berganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian nasional.

Dalam praktiknya, sejumlah negara berhasil memanfaatkan hilirisasi sebagai strategi transformasi ekonomi. Korea Selatan, misalnya, memulai industrialisasi dengan memproses baja dan elektronik sederhana sebelum beralih ke produk teknologi tinggi (Amsden, *Asia's Next Giant*, 1989). Sementara itu, Malaysia memanfaatkan hilirisasi kelapa sawit untuk mengembangkan industri oleokimia yang kini memasok pasar global. Studi oleh Kaplinsky dan Morris (2001) dalam *A Handbook for Value Chain Research* juga menegaskan bahwa negara berkembang harus masuk lebih dalam ke rantai nilai global untuk memperoleh bagian nilai tambah yang lebih besar.

Indonesia juga mengadopsi strategi hilirisasi terutama sejak awal 2010-an melalui kebijakan larangan ekspor mineral mentah. Dalam sektor nikel, misalnya, pembangunan smelter menghasilkan peningkatan pada ekspor besi dan baja serta mendorong masuknya investasi industri baterai kendaraan listrik. Namun, sejumlah akademisi menyoroti bahwa hilirisasi juga membawa risiko, seperti ketergantungan pada investasi asing, konsumsi energi besar, dan potensi kerusakan lingkungan (Pujayanti, *Jurnal Politica*, 2021). Karena itu, keberlanjutan lingkungan dan transfer teknologi harus menjadi bagian integral dalam implementasi kebijakan hilirisasi.

Secara keseluruhan, hilirisasi merupakan strategi yang berakar kuat pada teori ekonomi pembangunan dan terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan industri di berbagai negara. Keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas regulasi, kapasitas teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan integrasi dengan rantai nilai global. Dengan tata kelola yang baik, hilirisasi dapat menjadi fondasi bagi transformasi struktur ekonomi menuju ekonomi berbasis industri dan inovasi.

Hilirisasi memberikan dampak positif yang besar pada perekonomian, tapi untuk mewujudkannya banyak tantangan. Tantangan hilirisasi bisa berupa dukungan infrastruktur seperti ketersediaan energi (listrik, bahan bakar minyak, gas dll), jalan, dan pelabuhan yang belum memadai sehingga menjadikan investasi dalam hilirisasi menjadi mahal dan tidak efisien. Ketersediaan tenaga kerja terampil (*skill labor*)

yang terbatas sehingga produktivitas cenderung rendah yang pada akhirnya menyebabkan produk hilirisasi tidak berdaya saing baik terhadap barang impor yang masuk di dalam negeri atau terhadap barang di pasar luar negeri ketika akan diekspor. Untuk beberapa jenis hilirisasi dampak lingkungannya cukup serius terutama dibidang hasil tambang yang menghasilkan polusi dan kerusakan hutan. Belum lagi keterbatasan dana dan investor dalam negeri sehingga bisa mengundang investor luar negeri yang dapat menimbulkan kekhawatiran ada dominasi asing dalam hilirisasi. Pada akhirnya, hilirisasi harus dituangkan dalam kebijakan pembangunan yang memberikan arah dan tujuan hilirisasi serta dukungan kebijakan ekonomi yang ramah investasi dan iklim usaha yang sehat. Dan dalam pelaksanaannya harus ada sinergi dan kalaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pemerintah punya komitmen yang kuat untuk hilirisasi. Dalam RPJMN 2024-2029 dengan jelas tertuang dalam misi asta cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, penyelundupan

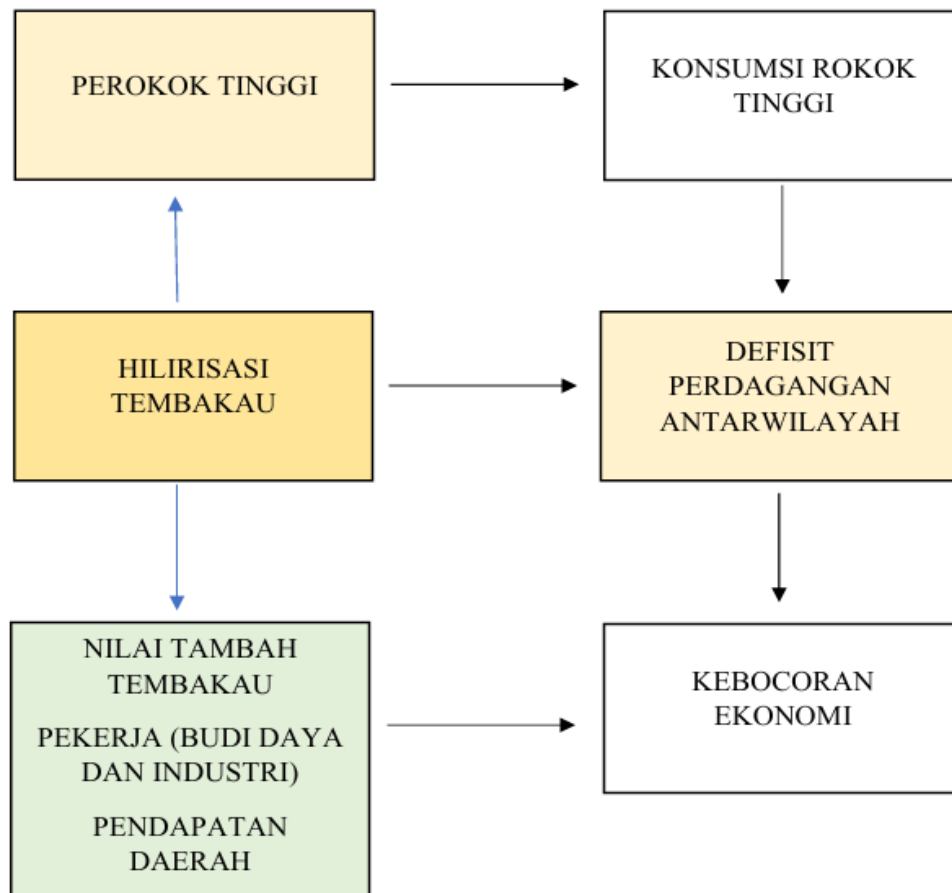
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Pada poin kelima asta cita tertuang bahwa pemerintah berkomitmen melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Lampung adalah provinsi yang tingkat perokoknya tertinggi di Indonesia. Artinya konsumsi rokok juga tinggi. Akibatnya pengeluaran konsumsi untuk rokok tinggi. Bahkan pengeluaran untuk tembakau dan rokok nomor dua setelah makanan jadi. Produsen rokok tidak berkembang di Lampung, walau ada petani yang menanam tembakau. Hanya ada beberapa pabrik rokok skala kecil. Dengan demikian, sebagian besar rokok yang dikonsumsi masyarakat Lampung berasal dari luar Lampung. Secara makro, perdagangan antarwilayah Lampung cenderung defisit, yang salah satu sumbernya adalah perdagangan rokok. Banyaknya pengeluaran untuk konsumsi rokok dari luar Lampung menyebabkan kebocoran ekonomi.

Untuk mengatasi hal ini perlu hilirisasi tembakau. Dengan hilirisasi, muncul kegiatan pengolahan tembakau yang menyebabkan perekonomian berkembang. Ekonomi yang berkembang menyediakan lapangan kerja, menyerap tembakau sebagai bahan baku, menghasilkan nilai tambah, dan potensi bagi pendapatan daerah. Pemahaman atas permasalahan ini dirumuskan dalam kerangka pikir penelitian analisis hilirisasi tembakau di Provinsi Lampung sebagai upaya peningkatan perekonomian dan pendapatan daerah sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

1. Diduga terdapat konfigurasi kekuatan, pengaruh, dan ketergantungan antarpemangku kepentingan dalam ekosistem hilirisasi tembakau di Provinsi Lampung
2. Diduga terdapat tingkat konvergensi dan divergensi kepentingan antaraktor terhadap tujuan strategis hilirisasi tembakau.
3. Diduga terdapat implikasi relasi antaraktor terhadap perumusan strategi peningkatan perekonomian dan pendapatan daerah.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metodologi mixed method yaitu pendekatan penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan kelebihan dari kedua metode sekaligus, sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks dengan lebih baik. Analisis data dalam penelitian mixed method melibatkan pengolahan data kuantitatif dan kualitatif secara sistematis, diikuti dengan integrasi hasil untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan data kualitatif diperoleh dari diskusi melalui focus grup discussion (FGD), yang kemudian dikuantifikasi untuk memudahkan analisis melalui aplikasi MACTOR.

#### 3.2 Focus Grup Discussion

*Focus Group Discussion* (FGD) adalah metode penelitian kualitatif dimana sekelompok kecil orang-orang (biasanya 6–12 orang) yang dipilih secara purposive dibawa bersama untuk mendiskusikan topik tertentu yang telah dirancang sebelumnya, dipandu oleh seorang moderator. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi pandangan, persepsi, sikap, dan pengalaman mereka terhadap isu yang dibahas melalui interaksi kelompok.

FGD berbeda dari survei kuantitatif atau wawancara individual karena penekanannya bukan pada generalisasi statistik, tetapi pada pemahaman mendalam terhadap perspektif, makna, dan nuansa pengalaman para partisipan. FGD memungkinkan peneliti memahami “bagaimana” dan “mengapa” di balik sikap, opini, atau perilaku. Interaksi antar peserta bisa memunculkan ide, refleksi, dan

*insight* yang mungkin tidak muncul jika peserta diwawancarai secara individual, misalnya saling memicu ingatan atau tanggapan satu sama lain.

Secara spesifik dalam penelitian mengenai hilirisasi tembakau di Provinsi Lampung, setelah melalui diskusi disimpulkan bahwa ada 7 aktor utama yang akan menjadi sampel dan peserta FGD untuk dimintai pendapat dan pandangannya tentang hilirisasi tembakau.

Adapun ketujuh aktor utama tersebut adalah:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),
2. Dinas Kesehatan,
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag),
4. Dinas Perkebunan,
5. Industri Rokok,
6. Petani Tembakau, serta
7. *Non-Governmental Organization* (NGO).

Sementara itu, hasil diskusi menyimpulkan bahwa variabel tujuan (*objectives*) yang menjadi fokus konvergensi dan divergensi para aktor meliputi:

1. Peningkatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT),
2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat,
3. Pengendalian Konsumsi Rokok,
4. Pengembangan Ekonomi Daerah (Peningkatan Tenaga Kerja dan Nilai Tambah), serta
5. Pengendalian Rokok Ilegal.

Hasil FGD menghasilkan dua matriks dasar yaitu:

1. **Matrix of Direct Influences (MDI)**

MDI	BAPPEDA	KESEHATAN	PERINDAG	PERKEBUNAN	INDUSTRI	PETANI	NGO
BAPPEDA	0	2	3	3	1	1	0
KESEHATAN	1	0	1	0	0	0	1
PERINDAG	1	1	0	1	1	0	0
PERKEBUNAN	1	0	1	0	0	1	0
INDUSTRI	1	3	3	1	0	4	2
PETANI	1	0	1	3	3	0	1
NGO	0	1	0	0	1	0	0

© LIPSOR-EPIITA-MACTOR

2. **Matrix of Actor-Objective**

2MAO	DBH CHT	Kesehatan	Kendali	Daerah	Ilegal
BAPPEDA	3	1	0	4	3
KESEHATAN	2	2	4	-1	-1
PERINDAG	2	0	-1	3	4
PERKEBUNAN	3	0	-1	3	0
INDUSTRI	-2	0	-4	1	4
PETANI	-1	0	-3	2	2
NGO	-3	2	3	-2	-2

© LIPSOR-EPIITA-MACTOR

Selanjutnya matriks ini diolah menggunakan aplikasi MACTOR

### 3.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menganalisis hilirisasi tembakau dalam upaya peningkatan perekonomian daerah dan pendapatan daerah di Provinsi Lampung. Analisis strategi dan kebijakan menggunakan prinsip partisipatif dari para aktor atau stakeholders yang terlibat dalam upaya pengembangan industri rokok guna meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah karena aktor (stakeholders)

memegang peran sangat penting dalam kebijakan. Faktor yang memiliki peran penting namun belum mendapat perhatian dalam menyusun strategi dan kebijakan pengembangan industri rokok dalam rangka hilirisasi tembakau yaitu interaksi antara aktor dan faktor yang beririsan dengan tujuan itu sendiri.

Metode ini menggunakan model multiple stakeholder analysis (MSA) yang dilakukan dengan analisis stakeholders menggunakan MACTOR (*Matrix of Alliance and Conflict: Tactic, Objectives and Recommendation*). Kelebihan metode MACTOR dibandingkan dengan metode MSA lainnya adalah: (1) mampu mendeskripsikan peran masing-masing stakeholder dalam sinkronisasi pengembangan industri rokok; (2) dapat menggambarkan seberapa kuat hubungan antar aktor (stakeholder); (3) mampu menunjukkan relasi aktor dengan tujuan yang ingin dicapai; (4) mampu menganalisis actor yang realtif terhadap suatu masalah/isu yang muncul (Bendahan et al. 2013).

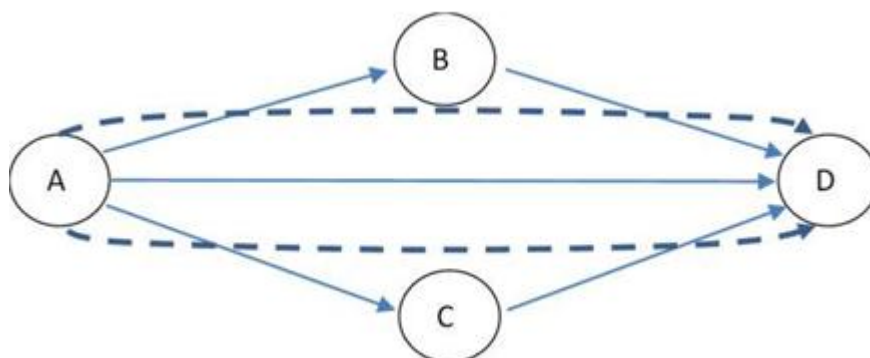
Metode MACTOR didasarkan pada pengaruh antar aktor. Setiap aktor memiliki penilaian terhadap pengaruh aktor lain dalam pencapaian tujuan. Hasil analisis MACTOR sangat tergantung dari kualitas data input yang diperoleh dari para aktor yang menjadi sumber informasi pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Metode MACTOR menggunakan 2 input utama, yaitu pengaruh aktor terhadap aktor lain dan posisi aktor terhadap tujuan yang ingin dicapai dari suatu isu. Data pengaruh aktor satu sama lain, disimpan dalam matrix indirect-direct influence (MIDI). Setiap aktor dapat saling atau tidak mempengaruhi, diukur pada skala mulai dari 0 sampai 4. Nilai bobot 0 (tidak ada pengaruh), 1 (mempengaruhi prosedur), 2 (mempengaruhi kerja), 3 (mempengaruhi misi), dan 4 (mempengaruhi eksistensi).

**Tabel 1. 3 Peran Variabel dan Implikasinya**

Nilai Bobot	Kriteria	Nilai Bobot	Kriteria
1	Vital bagi prosedur aktor	-1	Tujuan mempengaruhi aktor
2	Vital bagi keberhasilan aktor	-2	Tujuan menghalangi sukses aktor
3	Penting bagi misi aktor	-3	Tujuan menghalangi capaian aktor
4	Penting bagi eksistensi aktor	-4	Tujuan Menghalangi eksistensi aktor

Input kedua adalah posisi aktor terhadap suatu objektif. Data tersebut disimpan dalam matrix actor and objective (MAO). Matrix ini berisi aktor dan tujuan yang ingin dicapai. Nilai bobot untuk matriks MAO bernilai 1 sampai dengan 4 dan atau (-1) sampai dengan (-4). Tabel 5 menunjukkan kriteria nilai bobot hubungan antara aktor dan objektif.

Pengaruh antar aktor diperoleh dari penjumlahan korelasi antar semua aktor baik secara langsung maupun tidak langsung. Gambar menunjukkan pengaruh aktor A terhadap aktor lainnya. Pengaruh aktor A terhadap aktor C dan juga penjumlahan secara tidak langsung yang diperoleh melalui aktor D dan aktor B. hasil pengaruh langsung dan tidak langsung antar aktor akan terlihat pada MIDI.

**Gambar 3. 2 Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung Antar Aktor**

Metode MACTOR yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Godet (1991) dan Bendahan et al. (2003) dengan formula dan langkah-langkah sebagai berikut:

$$MIDI_{ab} = MID_{ab} + \sum_c (\min(MID_{ac}, MID_{cb})) \quad (1)$$

Persamaan 1 menunjukkan bahwa penentuan pengaruh tidak langsung diperoleh dari minimum dua pengaruh langsung yang dihasilkan dari nilai pengaruh langsung. Matriks ini memungkinkan untuk menentukan pengaruh secara umum maupun keterkaitan koefisien. Pengaruh secara umum merupakan penjumlahan masing-masing baris dan kolom dari matriks MIDI (persamaan 2 dan 3)

$$I_a = \sum_b (MIDI_{ab}) - MIDI_{aa} \quad (2)$$

$$D_a = \sum_b (MIDI_{ba}) - MIDI_{aa} \quad (3)$$

Dimana  $I_a$  dan  $D_a$  adalah pengaruh tidak langsung dan langsung dari aktor A, yang diperoleh dari matriks pengaruh langsung dan tidak langsung (MIDI).

Nilai-nilai pada persamaan 2 dan 3 kemudian dibandingkan dengan pengaruh aktor aktor lain, maka kekuatan masing-masing aktor dapat dihitung melalui persamaan 4.

$$r_a = \left( \frac{(I_a - MIDI_{aa})}{\sum_a (I_a)} + \frac{I_a}{I_a D_a} \right) \quad (4)$$

Setelah diketahui hubungan (koefisien) antar aktor seperti persamaan 4, hubungan antara aktor dan objektif diterapkan dengan cara yang sama. Hal ini akan terlihat pada matriks 1MAO pada persamaan 5, dalam matriks tersebut terlihat posisi suatu aktor terhadap suatu isu.

$$3MAO_{a-j} = 2 MAO_{a-j} + r_a \quad (5)$$

Sebagian besar analisis MACTOR bertolak dari persamaan 5, sejumlah nilai penting secara langsung diambil dari matriks 3MAO. Persamaan 6 menunjukkan objektif yang mendorong aktor bertindak reaktif. Sementara itu, persamaan 7 menunjukkan berapa banyak aktor yang mendukung (*agreement*) suatu isu

sedangkan persamaan 8 menunjukkan berapa banyak aktor yang tidak setuju (*disagreement*) terhadap objektif yang ingin dicapai.

$$Mob_a = \sum_i |3MAO_{a,i}| \quad (6)$$

$$Ag_j = \sum_a (3MAO_{a,i}(3MAO_{a,i} > 0)) \quad (7)$$

$$Disag_j = \sum_a (3MAO_{a,i}(3MAO_{a,i} < 0)) \quad (8)$$

Matriks 3MAO tersebut menjadi dasar apakah suatu objektif tersebut mendapatkan dukungan dari aktor. Dalam mencapai objektif aktor dapat bersinergi atau sebaliknya yang tercermin dari nilai objective convergence between actor (3CAA) pada persamaan 9 dan nilai objective divergence between actor (3DAA) pada persamaan 10.

$$3CAA_{a,b} = \frac{1}{2} \sum_i ((|3MAO_{a,i}| + |3MAO_{b,i}|), (3MAO_{a,i}, 3MAO_{b,i} > 0)) \quad (9)$$

$$3DAA_{a,b} = \frac{1}{2} \sum_i ((|3MAO_{a,i}| + |3MAO_{b,i}|), (3MAO_{a,i}, 3MAO_{b,i} < 0)) \quad (10)$$

Aktor dapat diajak bekerjasama atau berkonflik (ambivalen), nilai koefisien ambivalensi yang tinggi mengindikasikan semakin besar kemungkinan untuk bekerjasama atau sebaliknya (persamaan 11).

$$3EQ_i = 1 - \left[ \frac{(\sum_k |3CAA_{\{i,k\}}| - |3DAA_{\{i,k\}}|)}{(\sum_k |3CAA_{\{i,k\}}| + |3DAA_{\{i,k\}}|)} \right] \quad (11)$$

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan bab sebelumnya, maka simpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

#### 1. Konfigurasi Kekuatan, Pengaruh, dan Ketergantungan Antar Pemangku Kepentingan

Ekosistem hilirisasi tembakau di Provinsi Lampung dikendalikan oleh asimetri kekuasaan struktural yang menempatkan aktor INDUSTRI sebagai pemegang dominasi absolut dengan skor daya saing (*competitiveness*) tertinggi sebesar 2,1. INDUSTRI memiliki kemampuan mendikte langsung rantai pasok hulu dan memengaruhi kebijakan hilir. Kekuatan laten terbesar kedua dipegang oleh PETANI dengan skor daya saing sebesar 1,9, memosisikan berada di atas BAPPEDA (1,3). Hal ini membuktikan adanya hubungan ketergantungan tidak langsung yang kritis, di mana keberlangsungan seluruh investasi industri hilir secara fundamental bersandar pada stabilitas pasokan komoditas mentah dari petani di tingkat hulu. BAPPEDA bertindak sebagai penggerak utama regulasi (*relay actor*) yang menjembatani sistem perencanaan makro. Sebaliknya, dinas teknis seperti PERINDAG (0,6) dan PERKEBUNAN (0,5), bersama dengan KESEHATAN (0,3) dan NGO (0,3), berada pada posisi daya saing terendah dengan ketergantungan operasional yang tinggi. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan ruang fungsional mereka yang cenderung bersifat reaktif terhadap kebijakan aktor penguasa utama.

#### 2. Tingkat Konvergensi dan Divergensi Kepentingan Antar Aktor terhadap Tujuan Strategis

Terdapat keselarasan kepentingan yang sangat kuat dan masif dalam ekosistem ini terhadap tujuan Pengembangan Ekonomi Daerah dan Pengendalian Rokok Ilegal, di mana masing-masing objektif meraih dukungan mutlak berupa 13 persetujuan

berbanding 3 penolakan. Melalui analisis grafik konvergensi *Order 2*, terlihat integrasi kuat yang membentuk dua poros utama, yakni poros tata niaga riil (INDUSTRI - PETANI) dan poros birokrasi struktural (BAPPEDA - Dinas PERINDAG), dengan Dinas PERINDAG fungsional sebagai jembatan sektoralnya. Isu Pengendalian Konsumsi Rokok terkonfirmasi sebagai titik konflik paling kontroversial yang memicu polarisasi tajam dalam sistem, dengan mencatatkan 9 penolakan berbanding 7 persetujuan. Resistensi keras ini utamanya didorong oleh kelompok pelaku usaha dan petani yang mengkhawatirkan terjadinya kontraksi serapan pasar. Selain itu, isu Peningkatan DBH CHT juga memicu tarik-ulur kepentingan fiskal pemerintah daerah (10 dukungan) melawan beban efisiensi biaya yang dikhawatirkan oleh pelaku INDUSTRI (6 penolakan). Meskipun tujuan Perlindungan Kesehatan Masyarakat mendapatkan 5 persetujuan murni tanpa penolakan, isu ini menempati tingkat urgensi empiris paling rendah bagi para aktor jika dibandingkan dengan prioritas pembenahan tata niaga ekonomi dan regulasi pasar.

### 3. Implikasi Relasi Antar Aktor terhadap Strategi Peningkatan Perekonomian dan Pendapatan Daerah

Hilirisasi tembakau memiliki potensi empiris yang sangat besar di Provinsi Lampung, namun keberhasilannya secara mutlak dihadapkan pada dilema kebijakan (*policy dilemma*) yang sangat tajam. Potensi ekonomi ini didukung secara riil oleh tren pertumbuhan pengeluaran rokok masyarakat yang meningkat dengan rata-rata 9,92% per tahun hingga mencapai nilai total Rp2,86 triliun pada tahun 2023, di mana konsumsi di daerah perdesaan telah melampaui daerah perkotaan dan mengambil porsi hingga 16,68% dari pengeluaran non-makanan. Analisis jarak bersih antarobjektif (*net distances between objectives*) mengungkapkan bahwa kedekatan spasial yang ekstrem antara Pengembangan Ekonomi Daerah dan Pengendalian Konsumsi Rokok mengimplikasikan bahwa setiap langkah regulasi pembatasan konsumsi secara agresif akan langsung berbenturan dan menggerus urat nadi pendapatan daerah. Kendati demikian, konstelasi relasi ini menyajikan anomali struktural yang positif di mana kelompok pengawas sosial seperti NGO dan institusi KESEHATAN secara agregat memiliki kedekatan jarak terpendek

dengan blok pemerintah dan INDUSTRI dalam mendukung agenda makro seperti pemberantasan rokok ilegal dan kepatuhan hukum.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, guna menjamin keberlanjutan program hilirisasi yang inklusif dan berkeadilan, maka disarankan sebagai berikut :

### **1. Saran Praktis**

Dalam rangka mewujudkan hilirisasi tembakau yang berimplikasi langsung pada peningkatan pendapatan daerah, sinergi operasional yang tepat adalah antara aktor Pemerintah Daerah (BAPPEDA), INDUSTRI, dan PETANI. Kapitalisasi stabilitas produksi dari poros tata niaga menjadi postur penerimaan daerah yang optimal, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memegang peranan krusial sebagai koordinator perencana makro dalam merancang peta jalan kebijakan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Sebagai aktor penggerak sistem, BAPPEDA dituntut untuk memformulasikan alokasi DBH CHT secara presisi pada program-program esensial, seperti pembinaan kualitas bahan baku di tingkat tapak maupun agenda penegakan hukum gempur rokok ilegal guna melindungi pasar industri legal. Petani sebagai penyedia bahan baku dan pelaku industri sebagai penyerap utama harus diperkuat melalui kelembagaan kemitraan yang mengikat dan berkeadilan. Pelaku industri direkomendasikan untuk tidak sekadar berorientasi pada efisiensi penekanan biaya bahan baku di tingkat hulu, melainkan harus secara proaktif berinvestasi dalam pendampingan teknologi pasca panen guna menjamin ketersediaan pasokan yang senantiasa memenuhi standar mutu pabrikasi.

### **2. Saran Teoritis**

Penelitian selanjutnya disarankan untuk penyusun strategi kebijakan menggunakan MULTIPOL untuk menguji keefektifan berbagai kebijakan dan tindakan terhadap skenario dan untuk menentukan opsi aksi, kebijakan, dan skenario pada permasalahan yang dikaji.

### 3. Saran Kebijakan

Dalam rangka memanfaatkan peluang ekonomi maka dalam jangka pendek hilirisasi tembakau dapat diarahkan pada industri rokok. Tapi dalam jangka panjang maka hilirisasi rokok akan lebih tepat diarahkan pada industri nonrokok dalam rangka mengakomodasi aspek kesehatan yang juga merupakan tujuan pembangunan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. N., & Sasana, H. (2019). Pengaruh kemiskinan, pendapatan per kapita, harga rokok, produksi rokok terhadap konsumsi rokok di Indonesia. *Diponegoro Journal of Economics*, 1(1), 88–97.
- Afiyanti, Y. (2008). Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(1), 58–62.
- Amsden, A. H. (1989). *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization*. New York: Oxford University Press.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024). *Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Sebulan untuk Rokok dan Tembakau Menurut Tipe Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018–2023*. Bandar Lampung: BPS Provinsi Lampung.
- Barbour, R. (2007). *Doing Focus Groups*. London: Sage Publications.
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bendahan, S., Camponovo, G., Monnerat, J., & Pigneur, Y. (2013). Stakeholder analysis using MACTOR. Dalam *Conference Proceedings on Exploring Services Science*.
- Domar, E. D. (1946). Capital expansion, rate of growth, and employment. *Econometrica*, 14(2), 137–147.
- Edlund, J. E., & Nichols, A. L. (Eds.). (2024). *The Cambridge Handbook of Research Methods and Statistics for the Social and Behavioral Sciences: Volume 2*. Cambridge University Press. DOI: <https://doi.org/10.1017/9781009000796>
- Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton University Press.
- Fetoui, M., Frija, A., Dhehibi, B., Sghaier, M., & Sghaier, M. (2021). Prospects for stakeholder cooperation in effective implementation of enhanced rangeland restoration techniques in southern Tunisia. *Rangeland Ecology & Management*, 74, 9–20. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rama.2020.10.003>
- Godet, M. (2006). *Creating Futures: Scenario Planning as a Strategic Management Tool*. Paris: Economica.
- Harrod, R. F. (1939). An essay in dynamic theory. *The Economic Journal*, 49(193), 14–33.
- Hirschman, A. O. (1958). *The Strategy of Economic Development*. New Haven: Yale University Press.
- Kaplinsky, R., & Morris, M. (2001). *A Handbook for Value Chain Research*. Ottawa: International Development Research Centre.
- Kitzinger, J. (1995). Qualitative research: Introducing focus groups. *BMJ*, 311(7000), 299–302. DOI: <https://doi.org/10.1136/bmj.311.7000.299>
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). *Focus Groups: A Practical Guide for*

- Applied Research* (5th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2017). *International Economics: Theory and Policy* (10th ed.). Boston: Pearson.
- Liamputtong, P. (2011). *Focus Group Methodology: Principles and Practice*. London: Sage Publications.
- Malthus, T. R. (1798). *An Essay on the Principle of Population*. London: J. Johnson.
- Marbun, F. K. (2025). Kebijakan cukai rokok sebagai instrumen fiskal: Studi kualitatif tentang dampak konsumsi dan penerimaan negara di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 7(2), 171–182. URL: <https://ejournal.pps-unisti.ac.id/index.php/JIASK/issue/view/29>
- Maulidina, R., Kardoyo, & Pujiati, A. (2024). Dampak sosial dan ekonomi industri rokok terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian lokal di Kota Kudus. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi (JUPEK)*, 6(1), 70–76. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14279878>. URL: <https://jurnal.isdikkieraha.ac.id/index.php/jupek/article/view/753>
- Morgan, D. L. (1997). *Focus Groups as Qualitative Research* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press.
- Priyono, Priyanti, A., Asnawi, R., et al. (2025). Mapping stakeholders' dynamics for sustainable PKC distribution in cattle feed: An integrated MICMAC-MACTOR analyses. *Environmental Challenges*, 21, 101376. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envc.2025.101376>
- Pujayanti, A. (2021). Peran daerah dalam diplomasi ekonomi. *Jurnal Politica*, 7(1). DOI: <https://doi.org/10.22212/jp.v7i1.1118>
- Ricardo, D. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. London: John Murray.
- Richardson, H. W. (1973). *Regional Growth Theory*. London: Macmillan Press.
- Schultz, T. W. (1961). *Investment in Human Capital*. New York: Free Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.
- Stewart, D. W., Shamdasani, P. N., & Rook, D. W. (2007). *Focus Groups: Theory and Practice* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Swan, T. W. (1956). Economic growth and capital accumulation. *Economic Record*, 32(2), 334–361.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson Education.
- Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. *International Journal for Quality in Health Care*, 19(6), 349–357. DOI: <https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105.
- Wardhana, D. I., Aulia, A. N., Rita, A. I., Rismawati, R., & Riskiyono, S. (2024).

Strategi pengembangan agroindustri tembakau nonrokok di Kabupaten Jember. *Jurnal Agroindustri*, 14(1), 53–67. DOI: <https://doi.org/10.31186/jagroindustri.14.1.53-67>. URL: <https://ejournal.unib.ac.id/agroindustri/article/view/27345>